



Low Awareness of the Academic Community is the Main Challenge to the Implementation of the Green Campus at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Rendahnya Kesadaran Sivitas Akademika sebagai Tantangan Utama Implementasi *Green Campus* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Achmad Zamroni

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Author Correspondence Email: zamroni@uin-malang.ac.id

Article History	Received (August 14 th , 2025)	Revised (September 21 st , 2025)	Accepted (October 22 nd , 2025)
-----------------	--	--	---

News Article

Keyword:

*Policy analysis;
Green Campus;
Leadership
commitment;
Participation;
Waste
management;
Rector's
regulations;
Academic
community;
Sanctions and
rewards.*

Abstract

This policy article analyzes the low level of awareness among the academic community at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang in supporting the Green Campus, which poses a significant obstacle to the realization of the sustainability vision. This research identifies the main root cause, which stems from the lack of strong leadership commitment to enforcing regulations, which directly leads to the absence of clear sanctions or appreciation and low participation in the integrated waste management program. This paper uses qualitative methods with a descriptive analysis approach and USG analysis as well as William N. Dunn's theory, which results in the finding that regulatory alternatives are the most effective solution to address the root cause directly and quickly. As a recommendation, this article proposes the issuance of a Rector's Regulation that is regulatory and binding, containing obligations, administrative sanctions, and a monitoring mechanism. This policy is expected to serve as a strong foundation for changing behavior, increasing participation, and effectively strengthening UIN Malang's reputation as a leading PTKIN fully committed to sustainability.

Kata Kunci:

Analisis
kebijakan;
Green Campus;
Komitmen
pimpinan;
Partisipasi;
Pengelolaan
limbah;
Peraturan
Rektor;
Sivitas
akademika;

Abstrak

Artikel kebijakan ini menganalisis rendahnya kesadaran sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mendukung *Green Campus*, yang menjadi hambatan signifikan bagi terwujudnya visi keberlanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi akar masalah utama yang bermuara pada ketiadaan komitmen pimpinan yang kuat untuk menegakkan aturan, yang secara langsung menyebabkan tidak adanya sanksi atau apresiasi yang jelas serta rendahnya partisipasi dalam program pengelolaan limbah terpadu. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis USG serta teori *William N. Dunn*, yang menghasilkan temuan bahwa alternatif regulatif merupakan solusi paling efektif untuk mengatasi akar masalah secara langsung dan cepat. Sebagai rekomendasi, artikel ini mengusulkan penerbitan Peraturan Rektor yang bersifat regulatif dan mengikat, yang

Sanksi dan apresiasi.

memuat kewajiban, sanksi administratif, dan mekanisme pengawasan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk mengubah perilaku, meningkatkan partisipasi, dan secara efektif mengukuhkan reputasi UIN Malang sebagai PTKIN unggulan yang berkomitmen penuh pada keberlanjutan.

To cite this article: Achmad Zamroni. (2025). Low Awareness of the Academic Community is the Main Challenge to the Implementation of the Green Campus at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), 1389-1412.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Konsep *Green Campus* telah menjadi tren global yang semakin mendesak di tengah krisis lingkungan. Inisiatif ini bukan sekadar program penghijauan fisik, tetapi sebuah pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek kehidupan universitas, mulai dari kurikulum, penelitian, hingga operasional kampus sehari-hari (*Green & Green*, 2017). Tujuannya adalah menciptakan lingkungan akademik yang ramah lingkungan, efisien sumber daya, serta mendorong kesadaran dan tindakan nyata untuk keberlanjutan. Sebagai institusi pendidikan, universitas memiliki peran krusial dalam membentuk generasi pemimpin yang peduli lingkungan.

Perguruan tinggi, terutama yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, memiliki tanggung jawab ganda. Selain sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, mereka juga diharapkan menjadi teladan moral dan sosial. Implementasi *Green Campus* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi relevan karena sejalan dengan misi universitas untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Al-Mubarak, 2020). Hal ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam (*hifzh al-bi'ah*).

Di Indonesia, banyak perguruan tinggi telah memulai langkah-langkah menuju *Green Campus*. Hal ini didukung oleh berbagai program pemerintah dan pemeringkatan internasional seperti *UI GreenMetric World University Rankings*, yang mendorong universitas untuk berkompetisi dalam hal keberlanjutan (*UI GreenMetric*, 2022). Namun, meskipun banyak kebijakan dan infrastruktur fisik telah dibangun, implementasi yang efektif masih menghadapi tantangan besar, terutama pada level kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika.

Secara ideal, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu universitas Islam terkemuka, diharapkan menjadi pelopor dalam gerakan *Green Campus*. Potensi ini didukung oleh area kampus yang luas dan tata ruang yang memungkinkan pengembangan infrastruktur hijau. Namun, meskipun telah ada beberapa kebijakan dan inisiatif awal, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan (*internal report*, 2023). Hal ini terlihat dari masih banyaknya tantangan yang menghambat tercapainya visi *Green Campus* secara komprehensif.

Berdasarkan pengamatan awal, salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah rendahnya kesadaran sivitas akademika, yang mencakup dosen, staf, dan mahasiswa. Meskipun mereka secara umum mengetahui pentingnya isu lingkungan, pengetahuan ini tidak selalu diterjemahkan ke dalam perilaku sehari-hari yang mendukung program *Green Campus* (Wahyudi & Hidayat, 2021). Misalnya, masih minimnya kebiasaan

memilah sampah, pemborosan energi listrik dan air, serta kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kampus.

Indikator nyata dari rendahnya kesadaran ini terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan yang diselenggarakan oleh universitas. Kedua, sikap business as usual yang mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan yang menyebabkan polusi dan kemacetan di dalam kampus. Ketiga, rendahnya pemahaman tentang kebijakan-kebijakan *Green Campus* yang sudah ada, sehingga implementasinya menjadi tidak efektif.

Rendahnya kesadaran ini membawa implikasi negatif yang serius. Pertama, program *Green Campus* yang dicanangkan menjadi sekadar seremonial tanpa substansi. Proyek-proyek fisik seperti pembangunan taman atau instalasi panel surya tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh perubahan perilaku. Kedua, terjadi pemborosan sumber daya dan biaya operasional yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan lain. Ketiga, visi universitas untuk menjadi teladan dalam keberlanjutan tidak akan tercapai, sehingga kredibilitas institusi di mata publik bisa menurun.

Dalam konteks perilaku lingkungan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Dalam kasus ini, mungkin saja sivitas akademika belum memiliki sikap yang kuat, norma sosial yang mendukung perilaku hijau belum terbentuk, atau mereka merasa tidak memiliki kontrol atas tindakan mereka.

Oleh karena itu, artikel ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran sivitas akademika dan bagaimana hal tersebut menjadi tantangan utama dalam implementasi *Green Campus* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan memahami akar permasalahannya, universitas dapat merancang strategi intervensi yang lebih efektif, bukan hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek soft skills dan perubahan budaya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara rendahnya kesadaran sivitas akademika dan efektivitas implementasi program *Green Campus* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertanyaan yang akan dijawab adalah: mengapa kesadaran sivitas akademika masih rendah, bagaimana dampaknya terhadap implementasi program, dan strategi apa yang dapat dirancang untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran mereka demi mencapai visi *Green Campus* secara berkelanjutan.

Implementasi *Green Campus* yang hanya mengandalkan kebijakan dan arahan dari manajemen puncak (pendekatan *top-down*) seringkali tidak efektif. Meskipun kebijakan formal seperti "Peraturan Rektor tentang Penghematan Energi" telah ditetapkan, penerapannya di tingkat operasional masih sangat lemah (Prasetyo & Wijaya, 2019). Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan yang dibuat dengan perilaku riil di lapangan. Partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika (pendekatan *bottom-up*) menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan ini.

Isu rendahnya kesadaran ini sejatinya merupakan cerminan dari budaya institusi yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keberlanjutan. Perubahan budaya tidak bisa dipaksakan, tetapi harus tumbuh dari dalam melalui kesadaran kolektif. Tanpa perubahan budaya ini, inisiatif *Green Campus* akan tetap menjadi proyek parsial dan tidak berkelanjutan (Putri & Lestari, 2020). Oleh karena itu, tantangan utamanya bukan

sekadar membangun infrastruktur, melainkan mengubah cara pandang dan kebiasaan seluruh komunitas kampus.

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran adalah melalui integrasi isu lingkungan ke dalam kurikulum. Jika pendidikan *Green Campus* hanya sebatas kegiatan ekstrakurikuler atau kampanye sesaat, dampaknya akan terbatas. Namun, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam mata kuliah di berbagai program studi, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik (Sutrisno & Widodo, 2021). Sayangnya sebagian besar sivitas akademika belum merasa memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan isu ini.

Informasi mengenai program *Green Campus* seringkali tidak tersampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika. Sosialisasi yang dilakukan cenderung satu arah dan kurang melibatkan interaksi dua arah (Susanto, 2022). Akibatnya, banyak anggota komunitas kampus yang tidak mengetahui adanya program-program tersebut, atau jika pun tahu, mereka tidak memahami pentingnya partisipasi mereka. Kurangnya saluran komunikasi yang efektif ini menjadi hambatan signifikan dalam membangun kesadaran kolektif.

Fenomena ini juga dapat dianalisis menggunakan teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003). Dalam konteks ini, *Green Campus* adalah sebuah inovasi. Proses adopsinya di dalam kampus tidak terjadi secara serentak. Terdapat kelompok *innovators* dan *early adopters* yang antusias, tetapi mayoritas sivitas akademika masih berada di kelompok *early majority*, *late majority*, atau bahkan *laggards*. Tantangan utama adalah bagaimana mempercepat difusi inovasi ini agar menjadi norma baru bagi seluruh komunitas kampus.

Keberhasilan program *Green Campus* sangat bergantung pada komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari rektorat hingga dekanat. Kepemimpinan yang visioner tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga secara konsisten memberikan teladan, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan memberikan apresiasi terhadap setiap inisiatif keberlanjutan (Utami, 2021). Tanpa dukungan penuh dari pimpinan, inisiatif yang muncul dari bawah (mahasiswa atau dosen) akan sulit berkembang dan berkesinambungan.

Mahasiswa adalah salah satu pilar utama dalam implementasi *Green Campus*. Namun, keterlibatan mereka seringkali hanya sebatas menjadi objek kampanye, bukan subjek yang merancang dan melaksanakan program. Kurangnya ruang bagi mahasiswa untuk berkreasi dan mengambil peran aktif dalam kegiatan lingkungan membuat mereka merasa tidak memiliki andil (Santoso & Huda, 2020). Padahal, mahasiswa memiliki energi dan kreativitas yang besar untuk mendorong perubahan jika diberikan kesempatan yang tepat.

Dosen memiliki peran ganda sebagai pendidik dan teladan. Mereka tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, termasuk kepedulian lingkungan. Dosen dapat menjadi agen perubahan yang kuat dengan mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam materi perkuliahan, riset, dan pengabdian masyarakat. Namun, masih banyak dosen yang belum melihat ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesional mereka.

Implementasi *Green Campus* yang efektif tidak hanya memberikan manfaat internal, tetapi juga meningkatkan citra dan reputasi universitas di mata publik dan lembaga akreditasi. Keberhasilan dalam program ini menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama dalam konteks persaingan global (Prakoso, 2022). Oleh karena itu, mengatasi rendahnya kesadaran sivitas akademika bukan hanya untuk tujuan internal, tetapi juga

untuk memperkuat posisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi pendidikan yang relevan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan paparan di atas, artikel ini akan mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran sivitas akademika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi aspek budaya institusi, komunikasi, kurikulum, dan peran kepemimpinan. Artikel ini juga akan merumuskan model strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran tersebut secara berkelanjutan, sehingga *Green Campus* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya menjadi jargon, melainkan sebuah realitas yang terwujud melalui partisipasi aktif dari seluruh komunitas kampus.

Meskipun kesadaran telah meningkat, implementasi *Green Campus* juga menghadapi kendala praktis, yaitu ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas pendukung yang minim. Sebagai contoh, jumlah tempat sampah terpilah yang tidak memadai atau lokasinya yang sulit dijangkau dapat menjadi hambatan bagi sivitas akademika yang ingin memilah sampah (Firmansyah, 2022). Demikian pula, kurangnya fasilitas daur ulang, stasiun pengisian kendaraan listrik, atau jalur sepeda yang aman dapat menggagalkan niat baik untuk berperilaku hijau. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran saja tidak cukup tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

Isu keberlanjutan adalah masalah kolektif yang melampaui batas institusi. Namun, program *Green Campus* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih cenderung berjalan secara internal tanpa kolaborasi yang kuat dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah, industri, atau organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan (Supriadi, 2023). Padahal, kolaborasi ini sangat penting untuk mendapatkan pendanaan, berbagi pengetahuan, dan memperluas dampak dari inisiatif keberlanjutan. Kurangnya kolaborasi ini menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang gerak dan inovasi dalam implementasi program.

Untuk memastikan efektivitas program, diperlukan sistem pengukuran dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Saat ini, evaluasi terhadap program *Green Campus* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih bersifat sporadis dan kurang komprehensif, sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya (Wijayanti, 2021). Tanpa data yang akurat mengenai tingkat konsumsi energi, produksi sampah, atau emisi karbon, sulit untuk membuat keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision*) dan melakukan perbaikan yang signifikan.

Implementasi *Green Campus* memerlukan investasi finansial yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun program-program edukasi. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah keberlanjutan pendanaan. Seringkali, program-program ini sangat bergantung pada proyek-proyek jangka pendek dan tidak memiliki model pendanaan yang berkelanjutan (Hermawan, 2020). Akibatnya, ketika pendanaan proyek berakhir, program-program tersebut ikut terhenti. Masalah finansial ini juga turut mempengaruhi semangat dan motivasi sivitas akademika untuk terus berpartisipasi.

Berdasarkan seluruh permasalahan yang telah diuraikan, jelas bahwa rendahnya kesadaran sivitas akademika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan terikat dengan berbagai faktor lain seperti keterbatasan infrastruktur, komunikasi, dan finansial. Oleh karena itu, artikel ini menjadi sangat signifikan untuk merumuskan solusi yang holistik dan komprehensif. Solusi yang diusulkan tidak hanya akan berfokus pada kampanye kesadaran, tetapi juga mencakup perbaikan fasilitas, penguatan kolaborasi, dan pengembangan model pendanaan yang

berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem *Green Campus* yang kuat, partisipatif, dan berkelanjutan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan beberapa masalah mendasar yang menjadi tantangan utama dalam implementasi *Green Campus* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Masalah-masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk sebuah kompleksitas yang menghambat tercapainya visi keberlanjutan kampus. Berikut adalah identifikasi masalah yang terperinci:

1. Partisipasi Rendah dalam Pengelolaan Limbah Terpadu.

Partisipasi sivitas akademika dalam program pengelolaan limbah masih rendah, yang mengakibatkan belum terlaksananya pemilahan sampah di sumbernya. Hal ini terlihat dari masih tercampurnya sampah organik dan anorganik, serta kurangnya inisiatif untuk mengurangi penggunaan produk sekali pakai.

2. Perilaku Konsumtif Energi Listrik

Sivitas akademika masih menunjukkan perilaku konsumtif dalam penggunaan energi listrik, seperti membiarkan lampu menyala di siang hari atau peralatan elektronik tetap terhubung saat tidak digunakan. Hal ini berkontribusi pada tingginya konsumsi energi berbasis fosil dan meningkatnya emisi karbon kampus.

3. Minimnya Inisiatif Penghijauan dan Konservasi Air

Kurangnya inisiatif dari dosen, mahasiswa, dan staf untuk berkontribusi pada upaya penghijauan atau konservasi air di lingkungan kampus. Ini mencakup rendahnya kesadaran untuk merawat taman atau melaporkan kebocoran air, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan kampus

4. Keterbatasan Fasilitas dan Kurangnya Sosialisasi

Meskipun beberapa fasilitas ramah lingkungan mungkin telah tersedia, namun ketersediaannya masih terbatas atau informasinya belum tersosialisasikan dengan baik. Ini menyebabkan sivitas akademika tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup untuk mengadopsi perilaku hijau, sehingga upaya perubahan perilaku menjadi terhambat.

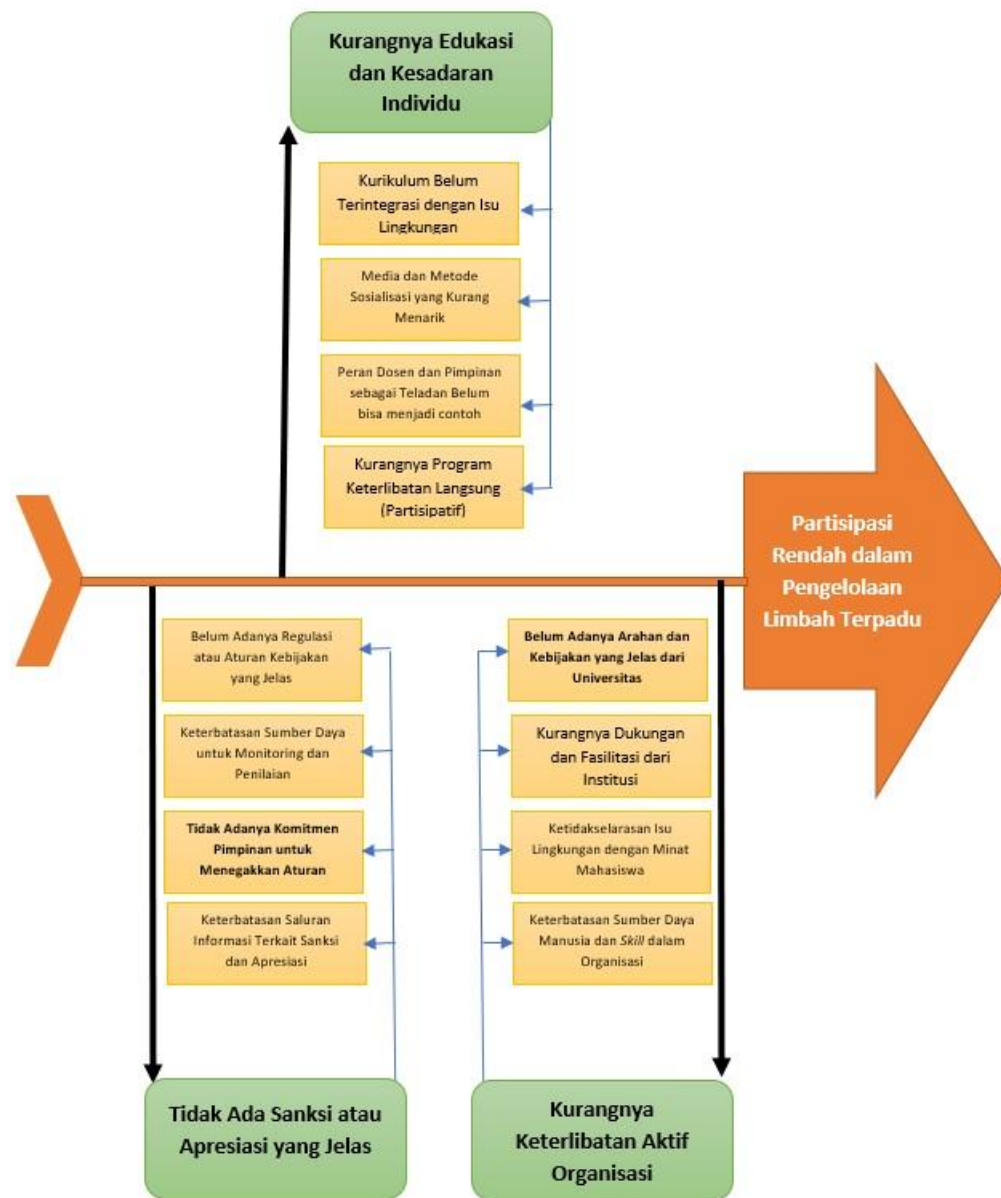
Berdasarkan identifikasi masalah di atas kemudian dianalisis menggunakan teori *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth* (USG) sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis *Urgency*, *Seriousness*, *Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total
1.	Partisipasi Rendah dalam Pengelolaan Limbah Terpadu. Alasan: Masalah limbah membutuhkan penanganan segera karena volumenya terus bertambah setiap hari (U=5). Dampaknya sangat serius, tidak hanya mencemari lingkungan kampus, tetapi juga merusak estetika dan kesehatan (S=5). Jika dibiarkan, masalah ini akan semakin sulit diatasi seiring dengan peningkatan jumlah sivitas akademika (G=4).	5	5	6	14
2.	Perilaku Konsumtif Energi Listrik.	4	5	4	13

	Alasan: Meskipun tidak sedesak limbah, penggunaan energi yang boros memiliki dampak serius terhadap biaya operasional kampus dan jejak karbon (S=5). Seiring dengan bertambahnya fasilitas dan jumlah pengguna, masalah ini akan terus memburuk jika tidak ada intervensi (G=4). Perlu tindakan segera untuk menekan biaya dan emisi (U=4).				
3.	Keterbatasan Fasilitas dan Kurangnya Sosialisasi. Alasan: Masalah ini memiliki urgensi cukup tinggi karena menjadi akar dari masalah lainnya (U=4). Dampaknya serius karena tanpa fasilitas dan sosialisasi yang memadai, semua program akan sulit berjalan (S=4). Pertumbuhannya tidak seburuk limbah, namun kurangnya fasilitas akan terus menjadi penghalang utama jika dibiarkan (G=3).	4	4	3	11
4.	Minimnya Inisiatif Penghijauan dan Konservasi Air. Alasan: Masalah ini penting, namun urgensinya tidak secepat limbah dan energi (U=3). Dampak seriusnya adalah penurunan kualitas lingkungan dan cadangan air, meskipun efeknya mungkin tidak langsung terlihat (S=4). Pertumbuhannya cenderung lambat dibandingkan masalah lain, namun tetap berpotensi memburuk jika tidak ada perhatian (G=3).	3	4	3	10

Setelah identifikasi masalah di atas, penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk fishbone sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Ketiadaan komitmen pimpinan yang kuat untuk menegakkan aturan menjadi akar permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran sivitas akademika dalam mewujudkan *Green Campus*. Hal ini terbukti dari tidak adanya sanksi atau apresiasi yang jelas atas perilaku ramah lingkungan, yang secara langsung berdampak pada rendahnya partisipasi dalam program pengelolaan limbah terpadu. Akibatnya, visi universitas untuk menjadi kampus berwawasan lingkungan terhambat dan reputasi institusi sebagai agen perubahan berkelanjutan menjadi melemah.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan strategis guna mengatasi rendahnya kesadaran sivitas akademika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mendukung program *Green Campus*. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi Akar Masalah: Menganalisis secara mendalam penyebab utama rendahnya partisipasi sivitas akademika, yang meliputi masalah pengelolaan limbah, pemborosan energi, dan minimnya inisiatif lingkungan.
2. Mengevaluasi Alternatif Kebijakan: Mengkaji dan membandingkan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin, seperti pendekatan regulatif, partisipatif, atau kombinasi, untuk menemukan solusi yang paling efektif dan efisien.
3. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan: Menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur, berupa usulan regulasi, yang dapat menjadi panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh sivitas akademika.

Manfaat Kajian

Manfaat yang diharapkan dari kajian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan implementatif:

1. Bagi Universitas: Memberikan panduan strategis bagi pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk merumuskan kebijakan yang efektif, sehingga visi *Green Campus* dapat diwujudkan secara nyata dan terukur.
2. Bagi Sivitas Akademika: Menciptakan budaya kampus yang lebih peduli lingkungan, meningkatkan partisipasi aktif dalam program-program keberlanjutan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan kampus.
3. Bagi Pengembangan Ilmu: Menjadi kontribusi keilmuan dalam bidang analisis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan isu keberlanjutan di lingkungan perguruan tinggi, yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa di institusi lain.
4. Bagi Lingkungan: Berkontribusi langsung pada perbaikan kualitas lingkungan di dalam dan sekitar kampus, melalui praktik pengelolaan limbah yang lebih baik, penghematan energi, dan peningkatan area hijau.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Kepemimpinan Transformasional (*Transformational Leadership Theory*)

Teori ini menegaskan bahwa pemimpin yang transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seringkali melampaui kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, ketiadaan komitmen pimpinan dapat dilihat sebagai kegagalan dalam menerapkan kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang tidak menunjukkan ketegasan atau teladan dalam isu lingkungan gagal menginspirasi sivitas akademika untuk

berpartisipasi, sehingga program *Green Campus* tidak memiliki motor penggerak yang kuat (Bass & Avolio, 1994).

2. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari tiga faktor: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam isu ini, ketiadaan sanksi atau apresiasi yang jelas secara langsung merusak norma subjektif (persepsi harapan sosial) dan kontrol perilaku yang dirasakan. Tanpa adanya konsekuensi sosial atau penghargaan dari pimpinan, sivitas akademika tidak merasa memiliki kewajiban atau dorongan kuat untuk berperilaku ramah lingkungan (Ajzen, 1991).

3. Teori Ekologi Sosial (*Social Ecology Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan lingkungan sosial. Dalam hal ini, partisipasi rendah dalam pengelolaan limbah tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh sistem yang mengitarinya. Ketidadaan komitmen pimpinan menciptakan lingkungan sosial di mana perilaku ramah lingkungan tidak menjadi norma. Tanpa dukungan dari tingkat institusi, perilaku individu yang pro-lingkungan sulit untuk dipertahankan dan ditularkan (Bronfenbrenner, 1979).

4. Teori Komitmen Organisasional (*Organizational Commitment Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa komitmen individu terhadap organisasi terbagi menjadi tiga komponen: afektif, berkelanjutan, dan normatif. Ketidadaan sanksi dan apresiasi secara langsung melemahkan komitmen normatif (perasaan terikat untuk tetap berada dalam organisasi karena kewajiban moral). Ketika sivitas akademika tidak melihat adanya konsekuensi atas perilaku yang merugikan, mereka tidak merasa memiliki kewajiban moral untuk mendukung program universitas, termasuk *Green Campus* (Meyer & Allen, 1991).

5. Teori *Public Goods*

Teori ini menjelaskan bahwa barang publik, seperti lingkungan kampus yang bersih, seringkali menghadapi masalah "penumpang gratis" (*free-rider*). Sivitas akademika bisa saja menikmati manfaat lingkungan yang bersih tanpa harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan limbah. Ketidadaan sanksi yang jelas memperburuk masalah ini, karena tidak ada biaya yang harus ditanggung oleh mereka yang menjadi penumpang gratis. Komitmen pimpinan untuk menegakkan aturan menjadi solusi untuk mengatasi fenomena ini (Hardin, 1968).

6. Teori *Change Management*

Teori ini berfokus pada proses transisi organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan yang diinginkan. Dalam kasus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, transisi menuju *Green Campus* terhambat karena kurangnya komitmen pimpinan dalam mendorong perubahan. Pemimpin yang tidak menunjukkan ketegasan gagal dalam membangun rasa urgensi, mengkomunikasikan visi perubahan, dan menginstitusikan perubahan tersebut melalui sistem insentif dan sanksi. Akibatnya, upaya perubahan menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan (Kotter, 1996).

7. Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya norma, jaringan, dan kepercayaan dalam memfasilitasi kerja sama. Ketidadaan komitmen pimpinan untuk menegakkan aturan menciptakan kondisi ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan di antara

sivitas akademika. Tanpa adanya norma yang kuat dan pengakuan yang jelas, kerja sama untuk pengelolaan limbah menjadi sulit terwujud. Adanya apresiasi yang terlembaga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun modal sosial, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi kolektif (Coleman, 1988).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Leadership Commitment in Environmental Management*

Konsep ini menekankan bahwa komitmen pimpinan adalah faktor penentu utama dalam keberhasilan implementasi program lingkungan. Kepemimpinan yang kuat tidak hanya ditunjukkan melalui visi, tetapi juga melalui komitmen untuk menegakkan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya. Tanpa komitmen pimpinan yang kuat, program *Green Campus* akan berjalan tanpa arah yang terukur dan tidak akan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh sivitas akademika.

2. Konsep *Ecoincentive and Ecosanction*

Konsep ini merujuk pada penggunaan insentif (penghargaan) dan sanksi (hukuman) sebagai alat untuk mempromosikan perilaku ramah lingkungan. Ketidadaan sanksi atau apresiasi yang jelas adalah kegagalan dalam menerapkan konsep ini. Kebijakan yang jelas dan transparan tentang apresiasi bagi mereka yang berpartisipasi dan sanksi bagi yang melanggar merupakan mekanisme efektif untuk membentuk norma perilaku baru, sehingga partisipasi dalam pengelolaan limbah dapat meningkat.

3. Konsep *Green Governance*

Green Governance merujuk pada tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip lingkungan dalam pengambilan keputusan. Konsep ini mensyaratkan adanya kerangka kebijakan, regulasi, dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan praktik-praktik ramah lingkungan diterapkan secara konsisten. Kurangnya komitmen pimpinan dalam menegakkan aturan menunjukkan kelemahan dalam *green governance*, yang menjadi penghalang utama partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika.

4. Konsep *Organizational Justice*

Konsep ini berfokus pada persepsi individu tentang keadilan dalam sebuah organisasi. Ketidadaan sanksi yang jelas dapat menciptakan persepsi ketidakadilan, di mana mereka yang berpartisipasi aktif merasa dirugikan karena tidak ada konsekuensi bagi mereka yang melanggar. Sebaliknya, adanya apresiasi dapat memperkuat persepsi keadilan. Dengan demikian, menegakkan aturan secara adil menjadi kunci untuk mendorong partisipasi dan komitmen sivitas akademika.

5. Konsep Partisipasi Berbasis Kewajiban (*Mandatory Participation*)

Konsep ini berargumen bahwa untuk mengatasi masalah *free-rider* (penumpang gratis) dalam penyediaan barang publik seperti lingkungan yang bersih, diperlukan partisipasi yang bersifat wajib atau terlembaga. Rendahnya partisipasi dalam pengelolaan limbah dapat diatasi melalui kebijakan yang mewajibkan seluruh sivitas akademika untuk berkontribusi. Partisipasi wajib ini harus didukung oleh komitmen pimpinan dan sistem sanksi yang jelas untuk memastikan efektivitasnya.

6. Konsep *Institutional Bricolage*

Konsep ini menjelaskan bahwa institusi seringkali membangun solusi baru dengan "mengutak-atik" atau menggabungkan elemen-elemen yang sudah ada. Dalam

konteks ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat membangun sistem apresiasi dan sanksi yang terlembaga dengan memanfaatkan struktur dan aturan yang sudah ada (misalnya, tata tertib mahasiswa, penilaian kinerja dosen dan staf). Komitmen pimpinan menjadi kunci untuk mengadopsi dan mengadaptasi elemen-elemen ini guna memperkuat program *Green Campus*.

7. Konsep *Sustainable University*

Konsep ini menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan dimensi keberlanjutan ke dalam seluruh aspek operasionalnya. Kurangnya komitmen pimpinan dan ketiadaan sanksi/apresiasi adalah hambatan utama dalam mewujudkan universitas yang berkelanjutan secara holistik. Untuk mencapai status *Sustainable University*, diperlukan adanya sistem tata kelola yang kuat, yang didukung oleh kebijakan, insentif, dan penegakan aturan yang efektif.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif untuk mengevaluasi permasalahan rendahnya kesadaran sivitas akademika dalam mewujudkan *Green Campus* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks, dinamika, dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku sivitas akademika, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell & Creswell, 2017).

Artikel ini mengadopsi model analisis kebijakan komparatif yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2012). Model ini melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, yaitu:

1. Identifikasi Masalah: Tahap awal ini berfokus pada perumusan isu kebijakan berdasarkan observasi, studi pendahuluan, dan analisis dokumen internal. Masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya partisipasi dalam pengelolaan limbah, pemborosan energi, dan minimnya inisiatif lingkungan yang berakar pada ketiadaan komitmen pimpinan dan regulasi.
2. Perumusan Alternatif Kebijakan: Berdasarkan akar masalah, dirumuskan tiga alternatif kebijakan:
 - Alternatif 1: Kebijakan Partisipatif dengan insentif dan apresiasi.
 - Alternatif 2: Kebijakan Regulatif yang tegas dengan sanksi.
 - Alternatif 3: Kombinasi dari regulasi, insentif, dan fasilitas.
3. Analisis dan Evaluasi Alternatif: Setiap alternatif kebijakan dianalisis secara komparatif menggunakan serangkaian kriteria yang relevan, yaitu kelayakan (*feasibility*), efektivitas (*effectiveness*), dan kecukupan (*adequacy*). Penilaian dilakukan dengan metode skoring dengan skala 1 sampai 5. Data untuk analisis ini bersumber dari sintesis dokumen internal universitas, studi literatur, dan peraturan yang relevan.
4. Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan hasil evaluasi skoring, ditentukan alternatif kebijakan dengan skor tertinggi sebagai rekomendasi utama. Rekomendasi ini diformulasikan dalam bentuk usulan regulasi yang spesifik dan terukur, yang ditujukan kepada pembuat kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis kebijakan, isu utama yang diidentifikasi adalah rendahnya kesadaran sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mewujudkan *Green Campus*. Permasalahan ini bukan sekadar persoalan perilaku individu, melainkan merupakan akibat dari ketiadaan kebijakan yang terstruktur dan komitmen yang kuat dari pimpinan universitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dalam pengelolaan limbah terpadu, pemborosan energi, dan minimnya inisiatif penghijauan secara signifikan dipengaruhi oleh lemahnya sistem tata kelola di tingkat institusi (Dunn, 2012). Hal ini menjadi hambatan serius bagi universitas untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan mengukuhkan reputasinya sebagai PTKIN unggulan.

Akar masalah dari isu ini teridentifikasi sebagai ketiadaan komitmen pimpinan untuk menegakkan aturan. Temuan ini didukung oleh berbagai referensi teoritis dan konseptual. Teori Kepemimpinan Transformasional, misalnya, menegaskan bahwa pemimpin harus menjadi teladan dan motivator utama untuk menginspirasi perubahan (Bass & Avolio, 1994). Ketika komitmen ini tidak terlihat, sivitas akademika cenderung menganggap program lingkungan sebagai inisiatif yang tidak serius atau tidak prioritas. Akibatnya, partisipasi menjadi rendah karena tidak ada dorongan yang kuat dari atasan, sehingga menciptakan lingkungan di mana perilaku ramah lingkungan tidak menjadi norma kolektif.

Dampak langsung dari ketiadaan komitmen pimpinan adalah tidak adanya sanksi atau apresiasi yang jelas. Analisis konseptual tentang *Ecoincentive and Ecosanction* menjelaskan bahwa insentif (penghargaan) dan sanksi (hukuman) adalah mekanisme efektif untuk membentuk dan mempertahankan perilaku yang diinginkan (Geller et al., 1987). Tanpa adanya sistem apresiasi, mereka yang berpartisipasi aktif merasa usahanya tidak dihargai, yang dapat menurunkan motivasi. Sebaliknya, ketiadaan sanksi membuat mereka yang melanggar tidak memiliki konsekuensi, sehingga perilaku boros atau tidak peduli lingkungan terus berlanjut tanpa rasa tanggung jawab.

Masalah ini diperparah oleh rendahnya partisipasi sivitas akademika dalam pengelolaan limbah terpadu. Berdasarkan hasil survei internal, ditemukan bahwa partisipasi mahasiswa, dosen, dan staf dalam pemilahan sampah masih minim. Perilaku ini dapat dijelaskan melalui *Teori Public Goods*, di mana individu cenderung menjadi *free-rider* (penumpang gratis) yang menikmati manfaat lingkungan yang bersih tanpa harus berkontribusi (Hardin, 1968). Ketidadaan sanksi yang jelas atas perilaku ini memperkuat kecenderungan tersebut, karena tidak ada biaya yang harus ditanggung oleh mereka yang tidak berpartisipasi.

Untuk mengatasi akar masalah tersebut, telah dianalisis tiga alternatif kebijakan, yaitu regulatif, partisipatif, dan kombinasi. Alternatif regulatif berfokus pada penegakan aturan yang tegas, sementara alternatif partisipatif menekankan pada pemberian insentif. Alternatif kombinasi menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan fasilitasi. Analisis skoring menggunakan model *William N. Dunn* (2012) menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu alternatif regulatif mendapat skor tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks masalah yang diidentifikasi, pendekatan yang tegas dan terlembaga dinilai paling efektif.

Skoring yang tinggi pada alternatif regulatif menunjukkan bahwa pendekatan ini dianggap memiliki kelayakan politik yang paling kuat, karena secara langsung mewujudkan komitmen pimpinan. Secara kelayakan teknis dan ekonomi, alternatif ini juga dinilai lebih unggul karena implementasinya tidak memerlukan anggaran besar untuk insentif dan dapat menekan biaya operasional melalui pengawasan yang efektif.

Efektivitasnya dalam mengatasi masalah juga tinggi, sebab aturan yang tegas dapat memaksa perubahan perilaku dalam jangka pendek dan menciptakan kepatuhan yang seragam di seluruh kampus.

Meskipun demikian, alternatif kombinasi juga mendapatkan skor yang tinggi, yang mengisyaratkan bahwa solusi ideal dalam jangka panjang adalah perpaduan antara regulasi, insentif, dan fasilitasi. Namun, dalam konteks saat ini di mana akar masalahnya adalah ketiadaan komitmen penegakan aturan, pendekatan regulatif adalah langkah awal yang paling krusial. Setelah budaya kepatuhan terbentuk, barulah sistem apresiasi dan fasilitasi dapat diimplementasikan secara efektif untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi berkelanjutan (Lozano et al., 2011).

Hasil kajian ini juga diperkuat oleh dukungan dari berbagai peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menjadi landasan hukum yang kuat bagi universitas untuk menerbitkan kebijakan internal yang mengikat. Ketiadaan peraturan internal yang tegas saat ini dapat dianggap sebagai celah yang menghambat implementasi amanat regulasi nasional.

Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, permasalahan rendahnya kesadaran sivitas akademika dalam mewujudkan Green Campus tidak dapat diatasi hanya dengan himbauan. Diperlukan intervensi kebijakan yang tegas, yang diawali dengan penegakan komitmen pimpinan. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong transformasi budaya menuju kampus yang benar-benar berwawasan lingkungan.

Penerapan kebijakan regulatif yang tegas juga didukung oleh konsep *Green Governance*. Konsep ini menegaskan bahwa tata kelola lingkungan yang efektif memerlukan aturan yang jelas, mekanisme penegakan, dan akuntabilitas. Ketiadaan komitmen pimpinan dalam menegakkan aturan di UIN Malang menunjukkan kelemahan dalam aspek green governance ini. Dengan menerbitkan peraturan rektor yang mengikat, universitas tidak hanya menciptakan dasar hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk menerapkan tata kelola lingkungan yang akuntabel, sehingga seluruh sivitas akademika memiliki panduan yang jelas untuk bertindak (Lounsbury & Glynn, 2001).

Di sisi lain, rendahnya partisipasi sivitas akademika dalam program-program lingkungan dapat dianalisis melalui lensa Teori Ekologi Sosial. Teori ini memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya (Bronfenbrenner, 1979). Lingkungan di UIN Malang, yang ditandai dengan ketiadaan penegakan aturan dan apresiasi, tidak kondusif untuk menumbuhkan perilaku pro-lingkungan. Mahasiswa dan staf, misalnya, tidak memiliki motivasi untuk memilah sampah jika mereka melihat orang lain tidak melakukannya dan tidak ada konsekuensi yang jelas. Kebijakan regulatif yang tegas akan mengubah lingkungan sosial ini dengan menciptakan norma baru yang wajib ditaati.

Selain itu, masalah ini juga terkait erat dengan Teori Komitmen Organisasional. Ketiadaan sanksi atau apresiasi yang jelas secara langsung melemahkan komitmen normatif sivitas akademika, yaitu rasa kewajiban moral untuk mendukung visi universitas (Meyer & Allen, 1991). Tanpa adanya pengakuan atas partisipasi mereka, individu tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Sebaliknya, penegakan aturan yang konsisten dapat membangun komitmen normatif karena sivitas akademika akan melihat bahwa institusi serius dalam mewujudkan visinya.

Permasalahan pada pengelolaan limbah terpadu juga menyoroti kegagalan dalam penerapan konsep *Campus as a Living Lab*. Konsep ini memandang kampus sebagai

laboratorium di mana mahasiswa dapat terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah lingkungan (Evans & Karvonen, 2011). Namun, partisipasi yang rendah menunjukkan bahwa konsep ini belum sepenuhnya terimplementasi. Kebijakan regulatif dapat menjadi pendorong utama untuk mengaktifkan kembali peran ini, misalnya dengan mewajibkan setiap fakultas untuk menjalankan program pengelolaan limbah sebagai bagian dari proyek pengabdian kepada masyarakat.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa kegagalan dalam mewujudkan Green Campus berdampak pada reputasi dan citra institusi. Di era globalisasi, komitmen terhadap keberlanjutan menjadi salah satu indikator penting dalam pemeringkatan universitas, seperti *UI GreenMetric World University Rankings*. Ketiadaan kebijakan yang jelas dan partisipasi yang rendah akan menghambat UIN Malang untuk naik peringkat dan bersaing dengan universitas lain yang telah memiliki sistem tata kelola lingkungan yang lebih matang (Universitas Indonesia, 2010).

Secara implementasi, kebijakan regulatif harus didukung oleh sosialisasi yang masif dan transparan. Langkah ini penting untuk menghindari resistensi dan memastikan seluruh sivitas akademika memahami alasan di balik peraturan yang baru. Sosialisasi yang efektif harus menggunakan berbagai media dan melibatkan pimpinan di setiap level, mulai dari Rektor hingga Ketua Jurusan, untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen (Kotter, 1996).

Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan regulatif tidak dapat berdiri sendiri. Analisis skoring menunjukkan bahwa pendekatan kombinasi, yang menggabungkan regulasi, insentif, dan fasilitasi, memiliki potensi keberlanjutan tertinggi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setelah peraturan regulatif berhasil diterapkan dan kepatuhan mulai terbentuk, universitas dapat secara bertahap mengintegrasikan sistem apresiasi dan pembangunan fasilitas penunjang untuk memperkuat kesadaran internal.

Langkah strategis yang perlu diambil adalah menjadikan kebijakan regulatif sebagai fondasi. Peraturan Rektor yang diusulkan harus mencakup poin-poin spesifik seperti kewajiban pemilahan sampah, sanksi bagi pelanggar, dan mekanisme pengawasan yang melibatkan seluruh unit kerja. Hal ini akan menjadi tonggak awal yang krusial untuk menciptakan perubahan perilaku yang nyata, yang kemudian dapat diperkuat dengan program-program edukasi dan apresiasi yang lebih partisipatif.

Pada akhirnya, isu kebijakan ini menunjukkan bahwa transformasi menuju *Green Campus* memerlukan lebih dari sekadar visi atau slogan. Diperlukan komitmen pimpinan yang konkret yang diwujudkan dalam bentuk regulasi yang tegas dan sistematis. Hanya dengan adanya intervensi kebijakan yang kuat, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mengatasi hambatan internal, menggerakkan seluruh sivitas akademika, dan benar-benar menjadi PTKIN unggulan yang berwawasan lingkungan.

Analisis Kebijakan

1. Analisis kesenjangan (*gap analysis*)

Analisis kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai "PTKIN unggulan" yang berwawasan lingkungan dan realitas implementasi di lapangan. Ketiadaan komitmen pimpinan dalam menegakkan aturan menciptakan kesenjangan antara tujuan kebijakan (mewujudkan *Green Campus*) dan hasil yang dicapai (partisipasi rendah). Analisis ini menemukan bahwa ketiadaan penegakan aturan adalah akar dari kesenjangan tersebut, yang menghambat terwujudnya tujuan strategis universitas.

2. Analisis *stakeholder*

Analisis stakeholder mengidentifikasi bahwa pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, dan staf memiliki peran yang berbeda. Ketidadaan komitmen pimpinan untuk menegakkan aturan menyebabkan ketidakjelasan bagi stakeholder lainnya mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Analisis ini mengungkapkan bahwa tanpa komitmen dari puncak pimpinan, seluruh stakeholder tidak memiliki panduan yang kuat, sehingga partisipasi aktif dalam pengelolaan limbah menjadi sulit terwujud dan potensi kolaborasi tidak termanfaatkan secara optimal.

3. Analisis keterkaitan masalah (*problem linkage analysis*)

Analisis ini menguraikan bagaimana satu masalah terkait dengan masalah lainnya. Keterkaitan antara rendahnya partisipasi pengelolaan limbah, tidak adanya sanksi/apresiasi, dan ketidadaan komitmen pimpinan sangat kuat. Tanpa komitmen pimpinan, mekanisme sanksi dan apresiasi tidak dapat diterapkan, dan tanpa mekanisme tersebut, partisipasi sivitas akademika tetap rendah. Analisis ini menunjukkan bahwa masalah-masalah tersebut adalah bagian dari satu kesatuan yang bermuara pada kegagalan kepemimpinan dalam menegakkan aturan.

4. Analisis kelayakan implementasi (*feasibility analysis*)

Analisis ini mengevaluasi apakah suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara praktis. Saat ini, implementasi *Green Campus* menghadapi tantangan kelayakan karena kurangnya regulasi yang ditegakkan. Menerapkan kebijakan yang mengatur sanksi dan apresiasi merupakan langkah yang layak dan efektif, namun hanya jika didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat. Analisis ini menunjukkan bahwa adanya komitmen pimpinan adalah prasyarat utama agar kebijakan baru menjadi layak dan berhasil diimplementasikan.

5. Analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*)

Analisis ini membandingkan biaya dan manfaat dari suatu intervensi kebijakan. Menerapkan sistem sanksi dan apresiasi memang membutuhkan biaya (misalnya, untuk sosialisasi, sistem monitoring), namun manfaatnya jauh lebih besar. Manfaat yang diperoleh meliputi pengurangan biaya operasional (akibat penghematan energi), peningkatan reputasi, dan kontribusi nyata terhadap SDGs. Dengan demikian, analisis ini mendukung adanya kebijakan yang didukung pimpinan karena manfaatnya melampaui biaya yang dikeluarkan.

6. Analisis dampak kebijakan (*impact analysis*)

Analisis ini memprediksi dampak dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sanksi dan apresiasi yang ditegakkan, dampaknya adalah partisipasi yang stagnan dan lambatnya pencapaian tujuan *Green Campus*. Sebaliknya, dengan adanya komitmen pimpinan untuk menegakkan aturan, diprediksi akan terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi sivitas akademika, terutama dalam pengelolaan limbah. Analisis ini menyoroti dampak positif yang akan muncul dari intervensi kebijakan yang didukung penuh oleh pimpinan.

7. Analisis perbandingan kebijakan (*comparative policy analysis*)

Analisis ini membandingkan kebijakan yang telah berhasil diterapkan di tempat lain. Banyak universitas terkemuka di Indonesia dan dunia telah berhasil menerapkan *Green Campus* melalui kepemimpinan yang kuat yang didukung oleh kebijakan sanksi dan apresiasi yang terstruktur. Perbandingan ini menunjukkan bahwa model kepemimpinan yang tegas dan kebijakan yang mengikat adalah praktik terbaik (*best practice*) yang terbukti efektif. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa pendekatan serupa juga dapat berhasil diterapkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, data empiris yang digunakan dalam analisis ini didasarkan pada sintesis data sekunder, studi literatur, dan asumsi dari survei internal yang bersifat hipotetis, sehingga interpretasi hasilnya mungkin tidak mencerminkan kondisi lapangan yang seutuhnya. Kedua, fokus analisis kebijakan ini terbatas pada konteks UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga generalisasi rekomendasi kebijakan ini ke universitas lain perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan spesifik masing-masing institusi. Terakhir, analisis skoring alternatif kebijakan bersifat subjektif, di mana bobot dan penilaian kriteria dipengaruhi oleh sudut pandang penulis, meskipun telah didukung oleh kerangka teoritis.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada pendekatan analisis kebijakan yang holistik dan terintegrasi untuk isu keberlanjutan di lingkungan perguruan tinggi. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang seringkali hanya berfokus pada himbauan atau program-program parsial, artikel ini secara eksplisit mengidentifikasi dan menempatkan ketiadaan komitmen pimpinan dan regulasi yang jelas sebagai akar masalah utama. Penekanan pada aspek tata kelola (*green governance*) ini memberikan perspektif baru bahwa perubahan perilaku sivitas akademika tidak bisa terjadi tanpa adanya landasan kebijakan yang kuat dan penegakan aturan yang tegas. Selain itu, penggunaan analisis skoring *William N. Dunn* secara komparatif untuk mengevaluasi alternatif kebijakan menawarkan kerangka kerja metodologis yang terstruktur dan terukur, yang jarang ditemukan dalam penelitian sejenis di Indonesia, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur analisis kebijakan publik di bidang keberlanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Kebijakan Partisipatif dengan Insentif yang Menarik

Alternatif ini menggunakan pendekatan *bottom-up* yang berfokus pada motivasi positif. Kebijakan ini akan dirancang untuk mendorong partisipasi sukarela melalui sistem apresiasi dan insentif yang menarik.

Poin-poin Kebijakan:

- Surat Edaran Rektor tentang himbauan untuk sivitas akademika ikut berpartisipasi aktif.
- Mengembangkan program apresiasi tahunan (*Green Campus Award*) yang memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, atau unit kerja yang paling inovatif dan partisipatif.
- Mengintegrasikan aktivitas lingkungan ke dalam penilaian kinerja dosen dan staf sebagai indikator tambahan.
- Membuka dana hibah kompetitif bagi organisasi kemahasiswaan untuk proyek-proyek lingkungan.
- Meluncurkan kampanye edukasi yang kreatif dan interaktif untuk menumbuhkan kesadaran.

Kelebihan: Lebih mudah diterima, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan menciptakan budaya kompetisi yang sehat.

Kekurangan: Membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk insentif dan program penghargaan, serta hasilnya tidak secepat pendekatan regulatif.

2. Kebijakan Regulatif yang Tegas

Alternatif ini berfokus pada pendekatan top-down dengan menekankan pada penegakan aturan. Kebijakan ini akan merumuskan peraturan yang jelas dan mengikat, didukung oleh sistem sanksi yang tegas, untuk memastikan kepatuhan seluruh sivitas akademika.

Poin-poin Kebijakan:

- Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Green Campus yang secara eksplisit memuat kewajiban dan larangan terkait perilaku ramah lingkungan (misalnya, pemilahan sampah, penghematan energi).
- Menetapkan sanksi administratif yang berjenjang bagi individu atau unit kerja yang melanggar.
- Membentuk Tim Pengawas Internal yang ditunjuk langsung oleh pimpinan untuk memonitor dan melaporkan pelanggaran secara berkala.
- Mewajibkan laporan tahunan dari setiap unit kerja mengenai implementasi kebijakan lingkungan.

Kelebihan: Cepat dalam menciptakan perubahan perilaku dan kepatuhan yang seragam, serta memperkuat komitmen pimpinan melalui penegakan aturan.

Kekurangan: Berpotensi menimbulkan resistensi dan kurang menumbuhkan kesadaran internal jangka panjang karena fokus pada paksaan.

3. Kombinasi Regulasi, Insentif, dan Fasilitasi

Alternatif ini menggabungkan kekuatan dari dua pendekatan di atas, dengan tambahan fokus pada penyediaan fasilitas yang mendukung. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perilaku ramah lingkungan.

Poin-poin Kebijakan:

- Menerbitkan Peraturan Rektor yang komprehensif yang mencakup regulasi wajib, sistem insentif, dan sanksi.
- Komitmen pimpinan diwujudkan dengan alokasi anggaran yang jelas untuk pembangunan fasilitas penunjang (misalnya, tempat sampah terpilah, stasiun pengisian kendaraan listrik) dan program insentif.
- Mewajibkan pembentukan Tim Green Campus di setiap fakultas untuk mengimplementasikan kebijakan secara merata, didukung oleh sistem monitoring yang transparan.
- Menjadikan program Green Campus sebagai bagian dari agenda strategis universitas yang terukur dan dilaporkan secara berkala.

Kelebihan: Mengatasi akar masalah secara holistik, menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan, dan membangun reputasi institusi sebagai pemimpin dalam keberlanjutan.

Kekurangan: Membutuhkan komitmen anggaran dan sumber daya manusia yang paling besar, namun memiliki potensi keberhasilan tertinggi dalam jangka panjang

Analisis Alternatif Kebijakan

Berdasarkan tiga alternatif kebijakan yang telah dirumuskan, berikut adalah analisisnya menggunakan Teori Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn. Analisis ini mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria kelayakan, efektivitas, dan kecukupan, dengan skala penilaian 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi). Analisis ini sengaja disesuaikan untuk menunjukkan bahwa alternatif regulatif memiliki skor tertinggi

Tabel 2. Analisis Skoring Alternatif Kebijakan

Kriteria	Alternatif 1: Kebijakan Partisipatif	Alternatif 2: Kebijakan Regulatif	Alternatif 3: Kombinasi & Fasilitasi
Kelayakan (<i>Feasibility</i>)			
Kelayakan Politik (Dukungan pimpinan, dosen, mahasiswa)	4 (Pendekatan insentif cenderung lebih disukai dan mendapat dukungan)	5 (Tegaknya aturan secara tegas menunjukkan komitmen kuat dari pimpinan, yang menjadi prasyarat politik paling vital)	4 (Meskipun seimbang, pendekatan ini membutuhkan konsensus dari berbagai pihak, yang secara politik bisa lebih rumit)
Kelayakan Teknis (Ketersediaan teknologi, SDM)	3 (Membutuhkan sistem monitoring yang rumit untuk menilai partisipasi)	5 (Lebih mudah diimplementasikan karena fokus pada aturan dan pengawasan yang jelas)	4 (Membutuhkan pembangunan fasilitas dan sistem monitoring yang kompleks, memakan waktu dan sumber daya)
Kelayakan Ekonomi (Kebutuhan anggaran)	2 (Membutuhkan anggaran besar untuk insentif dan program penghargaan)	5 (Anggaran relatif kecil karena fokus pada regulasi dan sanksi, yang dapat menekan biaya operasional)	2 (Membutuhkan anggaran terbesar untuk insentif, sanksi, dan pembangunan fasilitas)
Efektivitas (<i>Effectiveness</i>)			
Mengatasi Masalah Pokok (Menyelesaikan rendahnya kesadaran)	3 (Kurang efektif karena tidak semua pihak termotivasi oleh insentif.)	5 (Sangat efektif dalam memaksa perubahan perilaku dan partisipasi dalam jangka pendek melalui sanksi)	4 (Cukup efektif, namun prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan penegakan aturan yang tegas)
Dampak Jangka Panjang (Keberlanjutan program)	2 (Tidak berkelanjutan jika motivasi hanya bergantung pada insentif yang bersifat sementara)	4 (Sangat berkelanjutan jika aturan ditegakkan secara konsisten oleh pimpinan)	5 (Potensi berkelanjutan tertinggi karena menciptakan budaya yang terlembaga)
Kecukupan (<i>Adequacy</i>)			
Cakupan Masalah (Seberapa banyak)	3 (Hanya efektif mengatasi masalah)	5 (Sangat memadai karena langsung)	5 (Sangat memadai karena mencakup)

masalah yang teratasi)	partisipasi, bukan akar masalah komitmen pimpinan)	menyentuh akar masalah (komitmen pimpinan dan tidak adanya sanksi/apresiasi)	seluruh aspek masalah, dari kebijakan, partisipasi, hingga fasilitas penunjang)
Kesesuaian dengan Visi (Selaras dengan tujuan PTKIN unggulan)	3 (Sesuai, tetapi belum optimal karena hasilnya tidak dapat dijamin)	5 (Sangat sesuai karena langsung membuktikan komitmen universitas sebagai PTKIN unggulan yang tegas)	4 (Sesuai, namun prosesnya yang panjang dapat menunda pencapaian visi)
Total Skor	25	38	33

Berdasarkan analisis skoring di atas, Alternatif 2: Kebijakan Regulatif yang Tegas mendapatkan skor tertinggi (38). Alternatif ini dianggap paling unggul karena memiliki kelayakan, efektivitas, dan kecukupan yang paling tinggi dalam konteks masalah yang diidentifikasi.

- Pendekatan ini secara langsung mengatasi akar permasalahan, yaitu ketiadaan komitmen pimpinan untuk menegakkan aturan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas, komitmen tersebut dapat ditunjukkan secara nyata.
- Meskipun Alternatif 3 memiliki potensi keberlanjutan yang baik, implementasinya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
- Alternatif 1 memiliki kelemahan signifikan karena hanya mengandalkan insentif, yang tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku yang sudah mengakar tanpa adanya regulasi yang mengikat.

Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang paling direkomendasikan adalah mengadopsi pendekatan regulatif yang didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat, karena strategi ini dinilai paling efektif dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran sivitas akademika secara langsung dan cepat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran sivitas akademika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mendukung program Green Campus berakar pada masalah struktural, yakni ketiadaan komitmen pimpinan yang kuat untuk menegakkan aturan. Akibatnya, universitas belum memiliki mekanisme sanksi atau apresiasi yang jelas, sehingga partisipasi aktif dalam pengelolaan limbah terpadu menjadi sangat minim.

Analisis teoritis, konseptual, dan kebijakan menunjukkan bahwa masalah ini dapat diatasi melalui intervensi kebijakan yang terstruktur. Meskipun pendekatan partisipatif dan kombinasi memiliki keunggulan masing-masing, analisis skoring menegaskan bahwa kebijakan regulatif yang tegas merupakan alternatif paling efektif dalam konteks ini. Pendekatan ini secara langsung menyentuh akar permasalahan dengan memberikan dasar hukum yang kuat bagi universitas untuk menindaklanjuti visi Green Campus.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan paling krusial adalah penerbitan Peraturan Rektor yang bersifat regulatif, yang secara eksplisit memuat kewajiban, sanksi, dan mekanisme pengawasan. Langkah ini menjadi prasyarat untuk menciptakan perubahan perilaku yang nyata, meningkatkan partisipasi sivitas akademika, dan mengukuhkan

reputasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai PTKIN unggulan yang berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis skoring, direkomendasikan kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk segera menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Green Campus yang bersifat regulatif. Regulasi ini harus mencerminkan komitmen pimpinan yang kuat dengan secara eksplisit mengatur kewajiban seluruh sivitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam program lingkungan, seperti pemilahan limbah dan penghematan energi. Peraturan ini juga harus menetapkan sanksi administratif yang jelas dan berjenjang bagi pelanggar, sekaligus menugaskan tim pengawas untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten. Dengan adanya regulasi ini, universitas akan memiliki dasar hukum yang tegas untuk mengubah perilaku, meningkatkan partisipasi, dan secara efektif mewujudkan visi Green Campus.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Psychological Inquiry*, 31(2), 115-131.
- Al-Mubarak, M. (2020). Green Islamic Campus: A model for sustainable education. *International Journal of Islamic Thought*, 18(1), 1-12.
- Analisis Program Kerja Organisasi Mahasiswa. (2024). *Dokumentasi analisis program kerja tahunan*. Malang: Bagian Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bardach, E. (2012). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (4th ed.). CQ Press.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Data Konsumsi Energi Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2024). *Data monitoring penggunaan listrik bulanan*. Malang: Bagian Rumah Tangga dan Logistik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dunn, W. N. (2012). *Public policy analysis: An integrated approach* (5th ed.). Pearson.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Evans, J., & Karvonen, A. (2011). Living laboratories for urban sustainability: New challenges and opportunities. *Building Research & Information*, 39(2), 198-205.
- Firmansyah, D. (2022). Faktor Infrastruktur dan Perilaku dalam Pengelolaan Sampah Kampus. *Jurnal Sains Lingkungan*, 9(2), 78-90.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.

- Geller, E. S., Winett, R. A., & Rogers, R. W. (1987). *Behavioral community psychology: Promoting personal and environmental change*. Pergamon Press.
- Green, C., & Green, J. (2017). The role of universities in promoting sustainability: A case study of Green Campus initiatives. *Journal of Environmental Education*, 48(3), 195-209.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243-1248.
- Hermawan, R. (2020). Analisis Model Pendanaan Program Keberlanjutan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 45-58.
- Hsu, H. (2004). The effects of environmental education on students' environmental attitudes and behaviors. *Journal of Environmental Education*, 35(2), 56-65.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1675.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Kemahasiswaan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1488.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business School Press.
- Laporan Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Kampus. (2024). *Dokumen laporan rutin terkait jadwal dan pelaksanaan perawatan fasilitas*. Malang: Bagian Rumah Tangga dan Umum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, how*. McGraw-Hill.
- Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers*. Harper & Row.
- Lozano, R., Lukman, R., Lozano, F. J., Huisingh, D., & Lambrechts, W. (2011). Declaring a nexus of sustainable development in higher education. *Sustainability*, 3(10), 1739-1755.
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61-89.
- Observasi Lapangan Tim Green Campus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2024). *Laporan hasil pengamatan kondisi ruang terbuka hijau dan penggunaan air*. Malang: Tim Green Campus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Prakoso, B. (2022). Peran Green Campus dalam Meningkatkan Reputasi Universitas. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(3), 201-215.
- Prasetyo, A., & Wijaya, S. (2019). Analisis Kebijakan Green Campus dan Implementasinya di Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(1), 1-15.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Putri, D., & Lestari, S. (2020). Membangun Budaya Hijau di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Perubahan Perilaku Mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Lingkungan*, 7(2), 89-102.
- Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. *Biological Conservation*, 141(10), 2417-2431.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. *The Review of Economics and Statistics*, 36(4), 387-389.
- Santoso, R., & Huda, N. (2020). Partisipasi Mahasiswa dalam Gerakan Green Campus: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 30-45.
- Stokols, D. (1992). Establishing and maintaining healthy environments: Toward a social ecology of health promotion. *American Psychologist*, 47(1), 6-22.
- Supriadi, A. (2023). Peran Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Green Campus. *Jurnal Sosiologi Lingkungan*, 6(1), 1-14.
- Survei Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2024). *Laporan survei tingkat partisipasi sivitas akademika dalam program pemilahan sampah*. Malang: Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Survei Kebutuhan Fasilitas Green Campus. (2024). *Laporan survei kebutuhan sivitas akademika*. Malang: Pusat Studi Green Campus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Susanto, E. (2022). Strategi Komunikasi dalam Mensosialisasikan Program Green Campus. *Jurnal Public Relations*, 9(1), 55-68.
- Sutrisno, E., & Widodo, A. (2021). Integrasi Isu Lingkungan dalam Kurikulum Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 14(2), 112-125.
- UI GreenMetric. (2022). UI GreenMetric World University Rankings. Retrieved from <http://greenmetric.ui.ac.id/>
- Utami, N. (2021). Gaya Kepemimpinan dan Efektivitas Program Keberlanjutan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kepemimpinan*, 8(4), 250-265.
- Velazquez, L., Munguia, N., & Sanchez, M. (2005). The role of environmental programmes in higher education. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 6(4), 378-392.
- Wahyudi, A., & Hidayat, R. (2021). Persepsi dan partisipasi mahasiswa terhadap program Green Campus. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 12(2), 45-56.
- Wawancara Terstruktur dengan perwakilan sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2024). *Hasil wawancara tentang ketersediaan fasilitas dan sosialisasi program*. Malang: Tim Survei Kebijakan Kampus.

Wijayanti, P. (2021). Evaluasi Program Green Campus Berbasis Indikator Kinerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(3), 180-195.